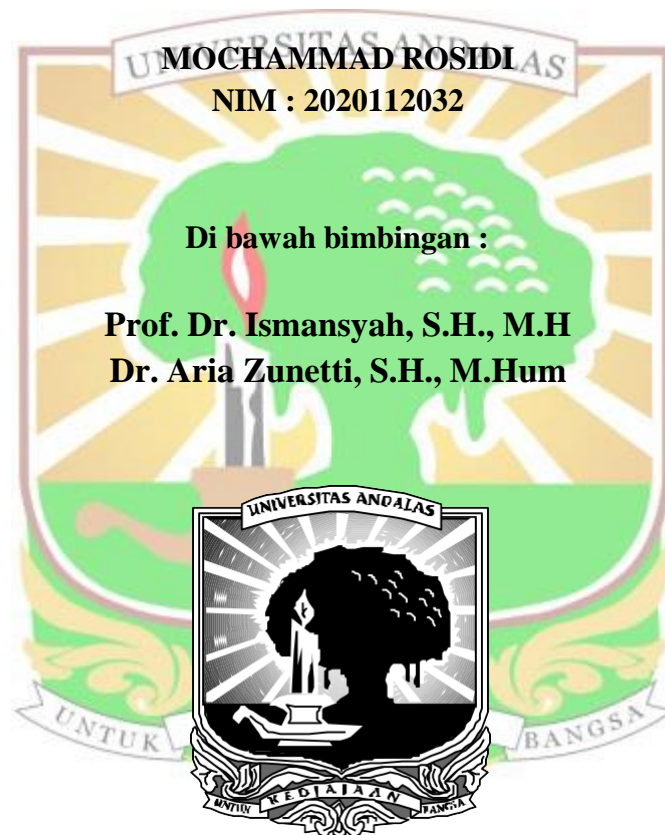


**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PENYELIDIK POLRI
DALAM PELAKSANAAN TUGASNYA DENGAN
MENGUNAKAN METODE PEMBELIAN TERSELUBUNG ATAS
TINDAK PIDANA NARKOTIKA DI WILAYAH HUKUM
KEPOLISIAN DAERAH SUMATERA BARAT**

TESIS

*Disusun Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Magister Hukum*

Oleh :



**PROGRAM STUDI MAGISTER ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS ANDALAS
2022**

**Perlindungan Hukum Terhadap Penyelidik Polri Dalam Pelaksanaan Tugasnya Dengan Menggunakan Metode Pembelian Terselubung Atas Tindak Pidana Narkotika Di Wilayah Hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat
(Mochammad Rosidi, 2020112032)**

ABSTRAK

Salah satu Teknik penyelidikan dengan teknik *undercover* biasanya dilaksanakan dalam mengungkap perkara narkotika, dengan istilah pembelian terselubung (*undercover buy*). Pasal 75 huruf (j) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika memberikan pengaturan tentang kewenangan penyidik untuk melakukan teknik pembelian terselubung dalam menangani tindak pidana narkotika. Pengungkapan kasus tindak pidana narkotika sangat sering dilakukan di Wilayah Hukum Polda Sumbar, dan sangat penting anggota penyidik untuk dilindungi pada saat teknik *undercover buy* berlangsung. Pada perumusan masalah dalam penelitian ini adalah, pertama, perlindungan hukum terhadap penyelidik Polri dalam pelaksanaan tugasnya dengan menggunakan metode pembelian terselubung atas tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat? Kedua, kendala apa sajakah yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap penyelidik Polri dalam pelaksanaan tugasnya dengan menggunakan metode pembelian terselubung atas tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat? Ketiga, upaya apa saja yang dilakukan dalam mengatasi kendala atas yang ditemui dalam perlindungan hukum terhadap penyelidik Polri dalam pelaksanaan tugasnya dengan menggunakan metode pembelian terselubung atas tindak pidana narkotika di wilayah hukum Kepolisian Daerah Sumatera Barat? Penelitian ini merupakan penelitian hukum deskriptif analitis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian pendekatan yuridis empiris. Data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu data sekunder dan data primer. Terhadap semua data dan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian disusun dan dianalisis secara kualitatif, dan disajikan dalam bentuk deskriptif kualitatif. Dari hasil penelitian dan pembahasan didapatkan kesimpulan bahwa: Pertama, Perlindungan bagi anggota polisi dalam melakukan pembelian terselubung dalam penyidikan narkotika pada dasarnya dilindungi oleh ketentuan yang ada dalam UU Narkotika, yaitu Pasal 100 ayat (1) UU Narkotika yang menyatakan bahwa: penyidik yang memeriksa perkara tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika beserta keluarganya wajib diberi perlindungan oleh negara dari ancaman yang membahayakan diri, jiwa, dan/atau hartanya, baik sebelum, selama maupun sesudah proses pemeriksaan perkara, kedua, kendala polisi dalam melakukan perlindungan penyidikan pembelian terselubung dalam penyidikan narkotika berupa kendala internal maupun eksternal. Kendala internal yaitu kurangnya jumlah peralatan yang diperlukan penyidik untuk pengungkapan dengan teknik pembelian terselubung, terbatasnya biaya operasional, dan terkendala oleh adanya penyidik yang mendapatkan teror dan menjadi saksi dalam persidangan. Serta kendala eksternal, dalam mendapatkan informan/spionase dari masyarakat, kendala menentukan lokasi pembelian terselubung, dan teknik ranjau. Ketiga, upaya yang dilakukan untuk mengatasi kendala polisi dalam melakukan perlindungan penyidikan pembelian terselubung dalam penyidikan narkotika: mengatasi kekurangan peralatan yang diperlukan, mengatasi biaya operasional yang terbatas, penyidik harus bersikap profesional, mendapatkan informan dan mengoptimalkan peran tersangka, menentukan lokasi pembelian terselubung dengan tepat, serta mengatasi teknik ranjau dengan maksimal.

Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pembelian Terselubung, Tindak Pidana Narkotika.

Legal Protection Against Police Investigations in the Implementation of Duties Using the Undercover Buy Method for Narcotics Crimes in the Legal Territory of the West Sumatra Regional Police

(Mochammad Rosidi, 2020112032)

ABSTRACT

One of the investigative techniques with the undercover technique is usually carried out in uncovering narcotics cases, with the term undercover buy. Article 75 letter (j) of Law Number 35 of 2009 concerning narcotics provides regulations on the authority of investigators to carry out covert purchasing techniques in dealing with narcotics crimes. Disclosure of narcotics crime cases is very often carried out in the Legal Area of the West Sumatra Regional Police, and it is very important for investigators to be protected when the undercover buy technique takes place. The formulation of the problem in this study is, first, legal protection for Polri investigators in carrying out their duties by using a covert purchase method for narcotics crimes in the jurisdiction of the Regional Police of West Sumatra? Second, what are the obstacles encountered in the legal protection of Polri investigators in carrying out their duties by using the disguised purchase method for narcotics crimes in the jurisdiction of the Regional Police of West Sumatra? Third, what efforts have been made to overcome the obstacles encountered in the legal protection of Polri investigators in carrying out their duties by using the covert purchase method for narcotics crimes in the jurisdiction of the Regional Police of West Sumatra? This research is a descriptive analytical legal research. The approach used in the research is an empirical juridical approach. The data used in this study are secondary data and primary data. All data and materials obtained from the research results were compiled and analyzed qualitatively, and presented in a qualitative descriptive form. From the results of the research and discussion, it was concluded that: First, protection for members of the police in making covert purchases in narcotics investigations is basically protected by the provisions in the Narcotics Law, namely Article 100 paragraph (1) of the Narcotics Law which states that: investigators who examine cases Narcotics crime and Narcotics Precursors and their families must be given protection by the state from threats that endanger themselves, their lives, and/or their property, both before, during and after the case examination process; internal and external constraints. Internal constraints are the lack of equipment needed by investigators for disclosure by hidden purchasing techniques, limited operational costs, and constrained by the presence of investigators who get terror and become witnesses in the trial. As well as external constraints, in obtaining informants/espionage from the public, obstacles in determining the location of covert purchases, and mine techniques. Third, efforts are being made to overcome police obstacles in conducting covert purchase investigations protection in narcotics investigations: overcoming the shortage of necessary equipment, overcoming limited operational costs, investigators must be professional, obtain informants and optimize the role of suspects, determine the location of covert purchases appropriately, as well as overcoming mine techniques to the maximum..

Keywords: Legal Protection, Undercover Buy, Narcotics Crime..

